

Strategi Dinas Komunikasi dan Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara

Alhadi Ahda, Ruezaini Soefi, Muridha Hasan

Universitas Gunung Leuser Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 13 Januari 2025

Revised: 15 Februari 2025

Accepted : 05 April 2025

KEYWORDS

Capability Level, Evaluation of Information Technology Governance, Kominfo

CORRESPONDENSI

Nama : Alhadi Ahda

Email : alhadiahda@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The Communication and Informatics Agency (DISKOMINFO) is engaged in communication, informatics, cryptography, and statistics. This study aims to evaluate information technology governance to determine the capabilities of DISKOMINFO of Southeast Aceh Regency. This study uses a qualitative descriptive method with an interview approach as the primary data collection technique. The survey results indicate that measuring the performance of information technology governance is needed to provide recommendations for improvement. The recommendations include strategic steps to improve capabilities through optimizing activities that have not been appropriately implemented. With these recommendations implemented, the target level of capability can be increased gradually to reach the maximum value at each level. This improvement in information technology governance not only supports the internal operations of DISKOMINFO but also positively impacts public services in Southeast Aceh Regency. This study is an essential reference for agencies to continue adapting and developing according to the digital era's demands.

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan fungsi pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik terus dilakukan, mulai dari mengubah layanan publik secara daring menjadi melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat (Sadik, 2022). Sejalan dengan itu, pemerintah menyediakan informasi yang transparan dan cepat kepada masyarakat. Khususnya dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik, ketersediaan informasi yang transparan dan terkini menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan. Dalam fungsi pelayanan, pemerintah daerah harus melayani setiap masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, yang mana pelayanan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari (Firdaus & Nggeboe, 2021).

Pelayanan yang diberikan dapat dikategorikan bermutu apabila penyelenggara pelayanan telah dibekali dengan dasar-dasar pelayanan agar pelayanannya bermutu. Untuk melayani masyarakat yang dikenal dengan sebutan publik, maka diciptakanlah pelayanan publik di Indonesia, yang mana pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri

untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dan pelaksana ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kebutuhan yang dipenuhi oleh setiap masyarakat untuk memenuhi barang dan jasa secara administratif yang disediakan oleh penyelenggara kebutuhan publik (Wiratno, 2020).

Pemerintah daerah menyampaikan informasi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui segala informasi yang tersedia. Informasi yang diberikan kepada masyarakat sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dengan adanya informasi, masyarakat dapat mengetahui peluang-peluang yang ada sehingga masyarakat dapat mengembangkan kualitas dirinya. Informasi tersebut harus disampaikan secara terbuka dan transparan. Penyampaian informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dilaksanakan dengan baik, dan akan memberikan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Penyediaan layanan penyampaian informasi akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mana akan membutuhkan informasi untuk mengetahui apa yang tidak diketahui dengan informasi yang dapat diketahui. Keterbukaan informasi yang dilakukan untuk memberikan informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Salvator & Heremba, 2023). Penyampaian informasi di Aceh Tenggara merupakan tugas Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, dan mengendalikan setiap kebijakan di bidang komunikasi dan informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tenggara juga bertanggung jawab dalam penyebarluasan informasi dan komunikasi publik yang mencerdaskan dan membentuk karakter masyarakat Aceh Tenggara agar cerdas dan mandiri. Informasi yang diberikan dapat memberikan peningkatan pengetahuan karena pada saat ini sangat dibutuhkan keahlian dan wawasan yang luas untuk meningkatkan kualitas hidup. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan penyampaian informasi publik sebagai layanan publik. Terwujudnya penyebarluasan Informasi dan Layanan Publik melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai misi dalam hal peningkatan kapasitas layanan penyebarluasan informasi, pemberdayaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan lembaga Komunikasi dan Informatika, kemudian Pengembangan Aplikasi, Konten Layanan Publik, Standardisasi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

Pemanfaatan jaringan TIK untuk meningkatkan Pelayanan Publik secara terbuka dan akuntabel akan meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika guna meningkatkan keterbukaan Informasi Publik (Fadri & Fil, 2024). Peningkatan pelayanan dan pemanfaatan infrastruktur merupakan tugas dalam melaksanakan amanat urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sakir, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada publik mencakup berbagai aspek. Penelitian dari [Silfiah dan Nabila \(2021\)](#), di Kabupaten Pasuruan menunjukkan implementasi strategi mewujudkan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebaliknya, penelitian dari [Adiansyah \(2022\)](#), di Kota Pangkalpinang mengidentifikasi peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam layanan informasi melalui aplikasi Kondite. Namun, terdapat kendala pemahaman publik terhadap aplikasi tersebut. Di Kota Cilegon, penelitian mengungkap bahwa strategi layanan informasi publik sudah membaik tetapi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan partisipasi publik ([Agustini & Riswanda, 2017](#)). Selain itu, analisis di Kabupaten Polewali Mandar menilai implementasi layanan informasi publik dalam konteks *good governance* ([Juharni et al., 2023](#)), dan penelitian di Kota Ternate mengevaluasi kualitas layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sandi ([Suleman & Fatah, 2021](#)).

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pentingnya strategi yang tepat, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, dan peningkatan partisipasi publik dalam meningkatkan layanan informasi publik. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dimensi dan tantangan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tenggara yang belum dibahas secara eksplisit dalam penelitian sebelumnya tentang kesiapan SPBE, SDM, dan anggaran. Kebaruannya terletak pada analisis yang komprehensif, identifikasi faktor kinerja utama, rekomendasi spesifik, dan pendekatan studi kasus yang mendalam untuk meningkatkan layanan informasi publik di daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis visi, misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Aceh Tenggara, serta menilai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mengidentifikasi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan karena memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberdayakan masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik dan komunikasi.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Aceh Tenggara ([Mohajan, 2018](#)). Pelayanan Kominfo pada Indikator Kinerja Utama (IKU) difokuskan pada penelitian dalam konteks penyampaian informasi pelayanan publik. Pengumpulan data dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana IKU tersebut diimplementasikan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh indikator kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Aceh

Tenggara. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan adalah data terkait Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dianggap mewakili kinerja pelayanan publik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi lapangan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengorganisasikan data ke dalam pola dan kategori yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan data berdasarkan konteks situasi, sikap dan pandangan responden, serta hubungan antar variabel yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang implementasi pelayanan publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tenggara.

Hasil dan Pembahasan

Perjalanan sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI yang pada awalnya bernama Departemen Penerangan. Berdirinya Departemen Penerangan ditandai dengan diangkatnya Bapak Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan memegang peranan penting dalam mengatur dan membina media massa, meliputi televisi, film, radio, grafis, percetakan, dan informasi publik. Struktur organisasi Departemen Penerangan terdiri dari beberapa direktorat yang secara umum bertanggung jawab atas berbagai aspek penyampaian informasi kepada publik (Ranti, 2024).

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1998 ketika Reformasi meletus yang menuntut kebebasan Pers. Presiden B.J. Habibie menanggapi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menghapuskan SIUPP dan memperkuat kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang mandiri. Pada tahun yang sama juga menjadi saksi lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menjadi dasar pengembangan telekomunikasi dan internet di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Penerangan dibubarkan dan digantikan oleh Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN), dan fungsi-fungsi tertentu dialihkan ke lembaga lain, seperti Departemen Pendidikan (Aulia, 2024).

Selanjutnya pada tahun 2001, dibentuklah Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika untuk menggantikan BIKN dengan Syamsul Mu'arif sebagai Menteri Negara. Pada tahun 2005, Kementerian ini kembali diubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Seiring berjalannya waktu, berbagai undang-undang baru tentang informasi dan komunikasi diberlakukan, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2009, Depkominfo resmi menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti yang kita kenal sekarang, dengan struktur organisasi yang terus berkembang untuk menghadapi tantangan era digital saat ini (Tjoetra et al., 2020).

Peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Dinas Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu fokus utama Dinas Komunikasi dan Informasi adalah penanganan pengaduan melalui *Whistleblower System* yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2023. Sistem ini bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran prinsip tata pemerintahan yang baik. Visi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Tenggara adalah mewujudkan penyebaran informasi dan pelayanan publik melalui TIK. Misi yang diemban antara lain meningkatkan kapasitas pelayanan informasi, memberdayakan OPD dan masyarakat, mengembangkan aplikasi, dan memanfaatkan jaringan TIK untuk meningkatkan pelayanan publik secara terbuka dan akuntabel.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika juga diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat, memberdayakan perekonomian, serta meningkatkan layanan dan pemanfaatan infrastruktur TIK. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki berbagai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, antara lain merumuskan kebijakan teknis di bidang teknologi komunikasi dan informatika, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan strategis organisasi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang terdiri dari Koordinator Media Informasi dan Koordinator Desain Komunikasi Visual menyampaikan informasi melalui situs web dan media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki sejarah panjang sejak berdirinya Lembaga Penerangan pada tahun 1945. Lembaga ini kemudian berkembang menjadi Kementerian Penerangan yang bertugas untuk mempertahankan kemerdekaan, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, serta memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia yang membidangi urusan informasi dan komunikasi (Muchsinin, 2022).

Kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bertugas merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang penyebaran informasi dan komunikasi publik.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Aceh Tenggara berjalan melalui komunikasi dua arah antara Kepala Dinas dengan pegawai. Kepala Dinas berperan sebagai komunikator. Sebaliknya, pegawai berperan sebagai komunikan, dimana proses komunikasi tidak hanya berupa penyampaian arahan tetapi juga melibatkan masukan atau tanggapan pegawai. Arahan tugas disampaikan secara langsung secara lisan atau tertulis dalam rapat tim atau personal, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, media komunikasi seperti lembar kerja, buku panduan, *PowerPoint*, panggilan telepon, dan pesan WhatsApp juga digunakan untuk menyampaikan informasi dalam situasi tertentu. Panggilan telepon dan WhatsApp terbukti efektif menjembatani komunikasi saat Kepala Dinas tidak berada di tempat.

Dimensi komunikasi organisasi meliputi komunikasi internal dengan arah vertikal, baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Komunikasi eksternal dilakukan melalui layanan informasi publik, yang diwujudkan dalam bentuk karya jurnalistik seperti berita radio dan siaran *talk show* pada Lembaga Penyiaran Publik Daerah. Namun demikian, dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa kendala dalam proses komunikasi seperti gangguan panggilan telepon saat berkomunikasi dan kendala bahasa yang timbul dalam pelayanan informasi publik secara langsung. Kendala-kendala tersebut dapat mengganggu efektivitas penyampaian arahan atau informasi.

Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki. Dengan memaksimalkan pemanfaatan media komunikasi dan meningkatkan kemampuan komunikasi pegawai, maka kualitas pelayanan informasi publik dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, penilaian kinerja dan pemberian motivasi oleh Kepala Dinas kepada pegawai sangat diperlukan untuk menciptakan suasana kerja yang produktif dan harmonis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi komunikasi organisasi di instansi pemerintah lainnya.

Daftar Pustaka

- Adiansyah, J. (2022). Peran Diskominfo Dalam Melakukan Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Kondite Di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Agustini, M., Riswanda, R., & F. (2017). Strategi pemerintah kota cilegon menuju cilegon smart city.
- Aulia, N. N. (2024). Sejarah Panjang Kominfo sebelum Berganti Nama Kementerian Komunikasi dan Digital. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-panjang-kominfo-sebelum-berganti-nama-kementerian-komunikasi-dan-digital-219524-mvk.html?page=3>
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era

Digital.

- Firdaus, F., & Nggeboe, F. (2021). Pengembangan Kapasitas Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 268. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1324>
- Juharni, J., Rauf, A., & Musfirah, A. (2023). Analisis Perilaku Aparat Birokrasi Pemerintahan Dalam Menberikan Pelayanan Publik di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(2), 389–404. <https://doi.org/10.35965/eco.v23i2.2895>
- MOHAJAN, H. K. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571>
- Muchsinin, M. (2022). Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Governansi*, 8(2), 99–108. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.4732>
- Ranti, S. (2024). Sejarah Nama Kominfo, dari Departemen Penerangan ke Komunikasi Digital. *Kompas.Com*. <https://tekno.kompas.com/read/2024/10/21/12350077/sejarah-nama-kominfo-dari-departemen-penerangan-ke-komunikasi-digital?page=all>
- Sadik, M. N. (2022). Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan di Daerah. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 3(1), 149–154. <https://doi.org/10.55745/jwbpb.v3i1.30>
- Sakir, A. R. (2024). Tinjauan Literatur: Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 6(2), 165–171. <https://doi.org/10.36917/japabis.v6i2.170>
- Salvator, M., & K. Heremba, N. (2023). Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i1.3137>
- Silfiah, R. I., & Nabila, A. (2021). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "Soliditas" (J-Solid)*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.31328/js.v4i1.2167>
- Suleman, S., & Abd Fatah, R. (2021). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate | Suleman | Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/4281/3421>
- Tjoetra, A., Ath Thariq, P., & Maifizar, A. (2020). Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Dan Perubahan Sosial (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(1). <https://doi.org/10.35308/jic.v4i1.1992>

Wiratno, W. (2020). IMPLEMENTASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE, SULAWESI SELATAN. SUPREMASI HUKUM, 16(2), 1–23. <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i2.739>